

ABSTRAK

Dampak dari persaingan global adalah perusahaan semakin dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Untuk itu, banyak perusahaan yang berusaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Tetapi, semakin besar laba yang didapatkan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini yang menyebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang harus ditanggung perusahaan. Sehingga perusahaan cenderung untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan berbagai cara. Satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk dapat meminimalkan pajak terutang adalah dengan melalui perencanaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dan *take home pay* pegawai apabila mempergunakan berbagai alternatif kebijakan PPh pasal 21, serta untuk mengetahui alternatif manakah yang paling efektif dan menguntungkan perusahaan serta pegawai dalam pemotongan PPh pasal 21.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus dengan memilih salah satu dari empat alternatif kebijakan PPh pasal 21, yaitu PPh pasal 21 ditanggung pegawai, PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja, PPh pasal 21 dijadikan tunjangan pajak dan PPh pasal 21 di *gross up*. Sedangkan data untuk penelitian diperoleh dari data gaji pegawai PT X di Bandung selama tahun 2007.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alternatif kebijakan PPh pasal 21 di *gross up* merupakan alternatif kebijakan terbaik untuk PT X dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang dan memberikan jumlah *take home pay* terbesar kepada pegawai.

Kata kunci : Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Terutang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Pemikiran.....	5
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	13
2.1.1 Definisi Pajak	13
2.1.2 Fungsi Pajak	16
2.1.3 Jenis Pajak	17
2.1.3.1 Jenis Pajak Menurut Golongannya	17
2.1.3.2 Jenis Pajak Menurut Sifatnya.....	18
2.1.3.3 Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya	19

2.1.4 Timbulnya Utang Pajak	19
2.1.5 Hapusnya Utang Pajak.....	20
2.1.6 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	22
2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	24
2.1.7.1 Stelsel Pajak	24
2.1.7.2 Asas Pemungutan Pajak	25
2.1.7.3 Sistem Pemungutan Pajak	26
2.1.8 Tarif Pajak	27
2.2 Pajak Penghasilan.....	29
2.2.1 Subjek Pajak	29
2.2.2 Objek Pajak	33
2.2.3 Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan dan Tidak Boleh Dikurangkan	37
2.2.3.1 Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan	37
2.2.3.2 Biaya-biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan.....	39
2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	41
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	42
2.3.1 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	42
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	44
2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Final	47
2.3.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	48
2.3.5 Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	50
2.3.5.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	50

2.3.5.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	51
2.4 Manajemen Pajak	51
2.4.1 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	52
2.4.1.1 Definisi Perencanaan Pajak.....	52
2.4.1.2 Tujuan Perencanaan Pajak	53
2.4.1.3 Tahap-tahap Perencanaan Pajak.....	53
2.4.1.4 Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21	55
2.4.1.5 Contoh Perhitungan Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21	58
2.4.2 Pelaksanaan Kewajiban Pajak (<i>Tax Implementation</i>)	62
2.4.3 Pengendalian Pajak (<i>Tax Control</i>).....	63
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	65
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	65
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	66
3.1.3 Tujuan dan Fungsi Perusahaan.....	66
3.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan.....	68
3.2 Metode Penelitian.....	69
3.2.1 Metode yang Digunakan	69
3.2.2 Teknik/Prosedur Pengumpulan Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Pegawai PT X	71
4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dan <i>Take Home Pay</i> Pegawai PT X	73
4.2.1 Alternatif Kebijakan 1: PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai...	73
4.2.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai	74
4.2.1.2 Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Pegawai	87
4.2.1.3 Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersil.....	90
4.2.2 Alternatif Kebijakan 1: PPh Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja.....	93
4.2.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai	94
4.2.2.2 Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Pegawai	94
4.2.2.3 Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersil.....	97
4.2.3 Alternatif Kebijakan 3: PPh Pasal 21 Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak	101
4.2.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai	101
4.2.3.2 Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Pegawai.....	114
4.2.3.3 Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersil	117
4.2.4 Alternatif 4: PPh Pasal 21 Di <i>Gross Up</i>	130
4.2.4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai	130
4.2.4.2 Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Pegawai.....	133
4.2.4.3 Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersil	136
4.3 Analisis Keseluruhan.....	139

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	142
---------------------	-----

5.2 Saran.....	144
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	145
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	50
Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Badan.....	51
Tabel 2.3 Formula Perhitungan Pajak Penghasilan.....	51
Tabel 2.4 Perhitungan PPh Pasal 21	59
Tabel 2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak dan PPh Pasal 21 Setahun	60
Tabel 2.6 Perbandingan <i>Take Home Pay</i> , Biaya Komersial dan Biaya Fiskal atas Pembayaran Gaji Mozaza	60
Tabel 2.7 <i>Take Home Pay</i> , Biaya Komersial dan Biaya Fiskal serta Selisihnya	61
Tabel 4.1 Status Pegawai PT X Berdasarkan Peraturan Perpajakan.....	71
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT X dengan Alternatif Kebijakan 1	75
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Dediwan K (K/1) untuk Tahun 2007 Menggunakan Alternatif 1	86
Tabel 4.4 Total <i>Take Home Pay</i> Pegawai PT X Menggunakan Alternatif 1 ...	87
Tabel 4.5 Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Dediwan K untuk Tahun 2007 Menggunakan Alternatif 1	89
Tabel 4.6 Total Selisih Biaya Fiskal dan Komersil Menggunakan Alternatif 1	90
Tabel 4.7 Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersil Dediwan K Menggunakan Alternatif 1	93

Tabel 4.8 Total <i>Take Home Pay</i> Pegawai PT X Menggunakan Alternatif 2 ...	94
Tabel 4.9 Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Dediwan K untuk Tahun 2007	
Menggunakan Alternatif 2	97
Tabel 4.10 Total Selisih Biaya Fiskal dan Komersil Menggunakan	
Alternatif 2	97
Tabel 4.11 Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersil Dediwan K	
Menggunakan Alternatif 2	100
Tabel 4.12 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT X Menggunakan	
Alternatif 3	103
Tabel 4.13 Perhitungan PPh Pasal 21 Dediwan K (K/1) untuk Tahun 2007	
Menggunakan Alternatif 3	113
Tabel 4.14 Total <i>Take Home Pay</i> Pegawai PT X Menggunakan Alternatif 3 .	114
Tabel 4.15 Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Dediwan K untuk Tahun 2007	
Menggunakan Alternatif 3	116
Tabel 4.16 Total Selisih Biaya Fiskal dan Komersil Menggunakan	
Alternatif 3	117
Tabel 4.17 Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersil Dediwan K Menggunakan	
Alternatif 3	120
Tabel 4.18 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT X Menggunakan	
Alternatif 4	121
Tabel 4.19 Perhitungan PPh Pasal 21 Dediwan K (K/1) untuk Tahun 2007	
Menggunakan Alternatif 4	132

Tabel 4.20 Total <i>Take Home Pay</i> Pegawai PT X Menggunakan Alternatif 4	133
Tabel 4.21 Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Dediwan K untuk Tahun 2007	
Menggunakan Alternatif 4	135
Tabel 4.22 Total Selisih Biaya Fiskal dan Komersil Menggunakan	
Alternatif 4	136
Tabel 4.23 Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersil Dediwan K Menggunakan	
Alternatif 4	139
Tabel 4.24 Ikhtisar PPh Pasal 21 Terutang, PPh Pasal 21 Disetor, <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersil serta Selisihnya	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	12
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Korporat	68

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Perhitungan PTKP Karyawan PT X**
- 2. Data Tunjangan Selain Tunjangan Pajak**
- 3. Tunjangan Pajak untuk Alternatif Kebijakan 3**
- 4. Tunjangan Pajak untuk Alternatif Kebijakan 4**